

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN HUTAN PASCA  
TERBITNYA UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH PADA PENGELOLAAN  
POLITIK KEHUTANAN DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Syarat Memeperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan  
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**SKRIPSI**

Oleh :

**Tengku Muhammad Fatthari**

**1410831005**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Aidinil Zetra MA NIP. 197002101999031001**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

## ABSTRAK

**Tengku Muhammad Fatthari, 1410831005. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Dengan Judul Skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengelolaan Hutan Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pengelolaan Politik Kehutanan di Indonesia”. Di bimbing Oleh : Dr. Aidini Zetra, MA. Skripsi ini terdiri dari 22 buku, 8 jurnal, 5 skripsi dan 11 sumber internet dan 5 peraturan undang-undang.**

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau hampir semenjak terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dulu hanya Kabupaten/Kota yang mengurus hutan sekarang semua dilimpahkan ke Provinsi. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena banyak kendala, karena didalam teori kendala menurut Goldratt Hansen dan Mowen yang mengatakan segala hal yang membatasi sistem, baik organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditemukan dalam pengelolaan hutan ini. Pengelolaan hutan ini tidak lepas pula dengan namanya politik kehutanan, karena di dalam politik kehutanan terdapat tata kelola hutan yang baik, dan didalam membuat kebijakan itu termasuk politik kehutanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran, konsep politik kehutanan dan kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa etik dan emik. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan digunakan teknik triangulasi data, sehingga menghasilkan data yang objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan hutan pemerintah harus menerapkan prinsi *Good Forestry Governance* itu termasuk didalam politik kehutanan dan dalam menjalankan peran pemerintah harus tanggap dan cekatan karena hutan yang harus di kelola banyak dan itu harus diawasi oleh pemerintah supaya tidak ada lagi perusahaan yang ilegal dalam mengelola hutan, dalam menjalankan perannya pemerintah juga tidak luput dari yang namanya kendala, kendala yang dihadapi pemerintah antara lain: (1) Lemahnya monitoring pengawasan, (2) Lemahnya proses perizinan, (2) Kurangnya anggaran operasional, (4) kurangnya keterbatasan personil.

**Kata Kunci: Politik Kehutanan, Peran, Operasional**

## ABSTRACT

**Tengku Muhammad Fathari, 1410831005. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science, University of Andalas, With Thesis Title "The role of the Department of Environment and Forests of Riau Province in Forest Management Post-issuance of Law No. 23 Year 2014 About the Government daeah on Political Management of Forestry Indonesia". Supervised By: Dr. Aidini Zetra, MA. This thesis consists of 22 books, 8 journals, theses 5 and 11 Internet sources and 5 regulatory legislation.**

The role of the Department of Environment and Forestry in forest management in Riau Province has almost since the issuance of Law No. 23 of 2014 concerning regional government which used to be only Districts / Cities that take care of forests now all delegated to the Province. The role carried out by the Riau Provincial Government in forest management is still very far from what was expected, because of many obstacles, because in the theory of constraints according to Goldratt Hansen and Mowen who said everything that limits the system, both organizations and companies in achieving goals found in forest management this. Forest management is not separated from the name of forestry politics, because in forestry politics there is good forest governance, and in making policies including forestry politics. The theories used in this study are role theory, forestry political concepts and constraints. This study uses qualitative methods with descriptive research types. Data collection techniques in this study used interview techniques and documentation. In the selection of research informants, researchers used a purposive sampling technique. The data obtained were analyzed by ethical and emotional analysis. To test the validity of the data obtained in the field, data triangulation techniques are used, resulting in objective data. The results of this study indicate that in the implementation of government forest management must implement the Good Forestry Governance principle, including in forestry politics and in carrying out the role of the government must be responsive and nimble because the forest must be managed a lot and it must be monitored by the government so that no more companies illegal in managing forests, in carrying out its role the government also does not escape from the name of the constraints, constraints faced by the government include: (1) weak monitoring monitoring, (2) weak licensing process, (2) lack of operational budgets, (4) lack of limitations personnel.

**Keywords: Politics of Forestry, Role, Operations**